

FRAGMENTASI PARTAI-PARTAI ISLAM PASCA ORDE BARU

Oleh: Ali Mas'ad¹

e-mail: alimasd08@gmail.com

STAI TARUNA SURABAYA

***Abstrak :** Spektrum politik Indonesia diwarnai oleh pergulatan elit politik yang terpilah dalam banyak kelompok, Kelompok islam dan yang memakai simbol-simbol islam merupakan salah-satu kelompok yang ikut andil dalam pertarungan politik, ketika orde baru masih eksis, partai yang ada hanya terdapat tiga partai yaitu Golkar, PDI dan PPP. Dari ketiga partai tersebut yang berafiliasi dan bernaafaskan islam hanya PPP. Namun begitu bola reformasi menggelinding maka PPP melahirkan partai-partai islam lainnya, semisal PKB, PBB, PKS dan lainnya,*

Khusus kasus politik islam pasca orde baru Kaum formalis memang meluncurkan partai-partai islam formal. Bahkan PPP yang semula berasaskan pancasila berganti berasaskan Islam, dan gambar ka'bah menggantikan gambar bintang segi lima, tetapi dari sejumlah partai yang menjamur di pasca orde baru, hanya ada satu partai yang menjadi dambaan dan tetap melekat di hati kaum santri yaitu Partai Persatuan Pembangunan.

***Kata Kunci :** Fragmentasi, partai islam, orde baru*

A. PENDAHULUAN

Sejak berdirinya rezim orde baru, spektrum politik Indonesia diwarnai oleh pergulatan elit politik yang terpilah dalam banyak kelompok. Hal ini terutama terreflesi dari munculnya puluhan partai politik yang masing-masing terpilah akibat perbedaan visi dan misi, bahkan spectrum ideology. Kelompok islam dan yang memakai simbol-simbol islam merupakan salah-satu kelompok yang ikut andil dalam pertarungan politik tadi.

Bahkan, kubu Islam sendiri terfragmentasi pula dalam beberapa kelompok yang kadangkala bersaing, bahkan bertentangan. Munculnya belasan partai islam adalah bukti konkrit dari fragmentasi kubu islam tadi. Bahkan, selain partai-partai politik islam, ternyata masih muncul pula kekuatan-kekuatan politik islam nonpartai seperti terrefleksi dari munculnya berbagai "milisi" (seperti Front Pembela Islam, Front Hizbullah, Laskar Jihad dan lainnya). Banyak di antaranya yang tak punya afiliasi –apalagi kordinasi-dengan partai politik islam tadi. Yang pasti, setiap varian kekuatan politik islam tadi, ternyata masing-masing mengklaim sebagai representasi dari aspirasi ummat. Masing-masing menggunakan berbagai atribut dan idiom islam guna menarik simpati massa, bahkan mereka cukup sering menggerakkan massa untuk tujuan politik mereka.

Sebenarnya, fragmentasi politik islam di Indonesia bukanlah fenomena baru. Pada era orde lama misalnya, kekuatan politik islam juga mengalami fragmentasi dalam beberapa partai semisal Masyumi, NU, Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti). Di

¹ Dosen STAI Taruna Surabaya

era orde baru, kendati kekuatan politik Islam difusikan dalam satu kekuatan bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun fragmentasi antar unsur tetap terjadi, yang bermuara pada peristiwa penggembosan PPP oleh NU tahun 1984.² Ketika orde baru berakhir, fragmentasi politik Islam kembali terjadi, bahkan dalam wujud yang lebih vulgar, di mana keterbelahan politik Islam mengkrystal dalam wujud belasan partai Islam.

Fragmentasi politik Islam dengan segala penyebabnya tadi tentu saja potensial menumbuhkan konflik intraumat. Karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dalam perspektif politik.

B. FENOMENA DALAM DUNIA SANTRI

Selama orde baru terdapat tiga fenomena penting dalam dunia santri, dimana satu dan yang lain saling mempengaruhi; *Pertama*, terjadinya santrinisasi priyayi”; yakni proses islamisasi yang intensif di kalangan priyayi dan golongan menengah pada umumnya. Banyak dari kaum Jawa abangan yang mulai tertarik menjalani praktik praktik islami secara lebih intensif, terutama dimulai dari praktik sufisme. Membanjirnya keterlibatan kaum priyayi dalam berbagai pengajian, membludaknya jumlah jamaah haji dan makin banyaknya masjid yang didirikan di wilayah basis kaum abangan misalnya, adalah bukti fenomena tadi.³

Kedua, kecenderungan pemerintah untuk merangkul kaum santri dalam birokrasi pemerintah, terutama berasal dari sarjana santri lingkungan Himpunan Mahasiswa (HMI). Dari mereka, bahkan ada yang menjadi Gubernur dan Menteri. Fakta ini oleh Burhan D. Magenda⁴ disebut sebagai cerminan pelaksanaan semboyan “Islam cultural yes, Islam ideology no” dari pemerintah ketika berhadapan dengan kubu Islam. Kebijakan ini dilakukan sedikit banyak karena pertimbangan realitas bahwa kelompok adat dan suku Jawa secara kultural memiliki keislaman yang kuat keislaman, sehingga perlu dirangkul dalam konteks perwujudan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini juga merupakan kompensasi dari kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih member kesempatan kepada kelompok Cina keturunan, dengan “mematikan” ekonomi Bazaar kaum santri.

Ketiga, terjadinya booming sarjana Muslim di era Orde Baru akhirnya menumbuhkan reorientasi pemahaman Islam yang sangat humanistik. Yakni makin pudarnya “Islam politik” dan tumbuhnya “Islam cultural”, sesuai rencana pemerintah orde baru. Donald K. Emerson, salah seorang pengamat politik Indonesia, berpandangan bahwa di alam orde baru, wajah Islam pelan tapi pasti menjadi lebih mewujudkan diri pada warna kulturalnya, dari pada bentuk pemahaman yang berbau ideologis yang pernah gagal perjuangannya di awal kemerdekaan hingga awal orde baru. Akibat pergeseran orientasi pemahaman Islam inilah akhirnya umat Islam cenderung bersikap “luwes” dengan menerima penerapan asas tunggal, suatu hal yang barangkali sulit jika Islam politik (formalism Islam) lebih ditekankan. Dengan penekanan pada penerapan Islam cultural inilah maka seluruh energy umat dimunculkan dalam bentuk kegairahan kegiatan beragama. Sementara itu, kegiatan berbau

² Ahkmad Muqawwam, *Membangun Kembali Kejayaan* (Jakarta: Pustaka Informasi, 2011), 67.

³ Burhan D. Magenda, *Perubahan dan Kesenambungan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 4.

⁴ *Ibid.*, 7.

politik seperti partai Islam tak lagi mendapatkan proporsi perhatian yang besar.

Reorientasi pemahaman islam ini, sekali lagi, tampaknya tak lepas dari implikasi lain yang timbul akibat kebijakan pemerintah baik lewat modernisasi politik yang dilancarkan di awal orde baru maupun ketika asas tunggal digelindingkan di gerbang 1980-an. Kebijakan-kebijakan semacam ini tampaknya secara tak langsung punya andil besar untuk mendorong umat islam menanggalkan baju ideologisnya.⁵

Dugaan seperti ini tidaklah keliru. Terbukti ketika orde baru yang dasar politiknya sangat fobi pada islam politik tumbang, maka sebagian elit politik islam yang di masa orde baru berpolitik pragmatis, menghindari sikap politik martir. Mereka akhirnya kembali menampilkan wajah aslinya sebagai islam politik, menampilkan partai politik islam dengan segala variannya. Namun sebagian santri lain ternyata ada yang secara prinsipil – bukan karena pemaksaan orde baru- memang mengubah visi politik ke arah cultural, sehingga meskipun perjuangan politik islam tetap diteruskan, namun mereka tetap memilih melalui jalur cultural. Kelompok ini kendaati mendirikan partai politik, namun memilih yang berwajah inklusif dalam penampilan, tapi tetap konsisten dalam keyakinan dan orientasi. Dari kecenderungan terakhir ini akhirnya memperlihatkan bahwa di tengah liberalisasi politik pasca orde baru ternyata fragmentasi politik di kalangan santri kembali terjadi, seperti terrefleksi dari lahirnya berbagai partai politik berbasis santri. Perbedaan dan fragmentasi tadi tentu saja berpotensi menimbulkan benturan atau bahkan letupan konflik antarkelompok yang sudah tentu akan diikuti oleh barisan pengikutnya.

C. POLA FRAGMENTASI DALAM ISLAM

Bagi kaum islamis, islam dipandang sebagai ajaran yang sangat khas. Islam tidak hanya mengatur urusan hubungan manusia dengan tuhan, tetapi lebih komprehensif mengatur pula hubungan antara manusia dengan manusia atau bahkan dengan alam semesta. Islam bersifat transcendental sekaligus social, yang dalam terminology al-Qur'an dinamakan *kaaffah*. Memang, dalam persoalan social, islam memberikan kebebasan berijtihad kepada ummatnya. Sebab, semua hal dalam koteks social memang pada asalnya dibolehkan, kecuali yang dilarang. Namun, ijtihad dalam wujud *ijma'* maupun *qiyas* tetap berpijak pada moralitas wahyu.⁶

Fenomena ini tentu saja mengindikasikan bahwa perbedaan interpretasi atau fragmentasi dalam islam meliputi banyak segi, mulai dai sisi ideology, politik, budaya, sosio ekonomi, sampai pada pola gerakannya. Sebagian kelompok berpendapat, paradigm politik islam seperti tadi diungkap misalnya, tentu hanya dapat diwujudkan jika kalangan islam menjadi pemegang otoritas, atau minimal dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan secara signifikan. Jalan untuk merealisasikan hal itu tidak lain adalah melalui jalur politik dalam arti seluas-luasnya,⁷ dengan membentuk

⁵ Dhuroruddin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 102.

⁶ *Ibid.*, 106.

⁷ Nur Khalis Madjid, "Kata Pengantar" dalam Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1996), ix.

konstitusi islam, memakai islam sebagai dasar dan ideology Negara. Dalam kaitan ini, Khomeini misalnya, berargumentasi bahwa setelah hokum dibuat perlu diciptakan kekuasaan eksekutif. Demikian pula islam. Setelah mendatangkan hokum, islam pun menetapkan pemegang kekuasaan eksekutif. Di zaman Rasulullah, hokum bukan saja disebarkan tapi dilaksanakan. Beliau juga pelaksana hokum dan beliau menjalankan hokum pidana islam.⁸ Dalam konteks politik, kaum islamis yang berpemikiran demikian kiranya dapat disebut sebagai kelompok Islam formalis. Sebab, memang mereka menghendaki islam secara formal ditamapilkan dalam kehidupan bernegara dan menadi dasar filosofis formal dalam mengelola Negara.

Namun pendapat itu ditentang oleh sebagian kalangan politik Islam lain yang kendati mengakui Islam bersifat kaffah, mengatur segala aspek kehidupan, namun bagi mereka nilai-nilai islam cukup saja menyinari ideology bukan menjadi ideology. Semangat islam cukup mendasari etika berpolitik dan bukan diformulasikan dalam bentuk Negara dan ideology politik. Mereka berpendapat, adalah sebuah kekeliruan besar untuk mencampuradukkan antara islam dan politik dalam wujud formalism. Islam bukanlah politik dan politik hendaknya jangan dipaksakan menjadi baju dari islam. Memasukkan islam dalam kerangka politik, kendati dengan maksud untuk mengagungkan islam, menurut kelompok kedua ini hakikatnya justru akan merendahkan islam.

Mereka berpendapat islam bukanlah ideology, tapi lebih sebagai sumber untuk membentuk ideologi bagi ummat islam.⁹ Dalam perspektif mereka, yang dinamakan ideologi islam adalah nilai-nilai musyawarah, kejujuran, kebenaran dan keadilan.¹⁰ Jika nilai-nilai tadi telah dilaksanakan dalam berbagai kebijakan dan kehidupan kemasyarakatan, pada saat itu ideology islam telah diterapkan dan Negara islam telah terwujud. Meminjam pendapat Pak Syafii Maarif, bahwa doktrin islam tidaklah menetapkan pola teori tentang Negara yang harus diikuti ummat islam. Yang penting bagi islam adalah prinsip musyawarah, keadilan dan kejujuran telah dilaksanakan. Secara pola piker, kaum islamis ini dapat digolongkan ke dalam kelompok islam substansial yang menekankan substansi dari pada formalitas.¹¹

Dalam konteks politik Indonesia kekinian, kelompok pertama menginginkan islam diformalkan dalam suatu parati politik di dalam sebuah Negara. Mereka juga menginginkan diterapkannya ideologi islam atau setidaknya dalam bentuk dihidupkannya kembali piagam Jakarta seperti dimunculkan Partai Bulan Bintang (PBB) dan dalam derajat lebih terbatas oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan kelompok kedua cenderung melihat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa telah merupakan refleksi dari ke-Islam-an itu

⁸ G.H. Jansen, *Islam Milton*, terj. Armahedi Mahzar (Badung: Pustaka, 1980), 205.

⁹ Nur Khalis Madjid, "Cita-cita Politik Islam" dalam *Aspirasi Ummat Islam Indonesia* (Jakarta: Leppenas, 1983), 16.

¹⁰ Ahmad Syafii Maarif, "Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia" dan M. Amien Rais, "Indonesia dan Demokrasi" dalam *Aspirasi Ummat Islam Indonesia* (Jakarta: Lappenas, 1983), 42 dan 73.

¹¹ Dhuroruddin Mashad, *Akar Konflik*, 109.

sendiri,¹² di saat yang sama mereka ingin untuk tidak menumbuhkan sikap menang sendiri terhadap kelompok agama lain dalam sebuah Negara nasional bangsa.

Perbedaan visi antara formalism dan substansialisme dalam konteks aktualisasi ajaran Islam ini akhirnya berimplikasi pada sikap dan kiprah mereka dalam dunia politik. Kelompok formalis pada akhirnya berusaha optimal untuk mengaktualisasikan visinya tentang islam dalam bernegara secara formal pula dalam berbagai bentuk institusi, seperti partai islam. Mereka secara terang-terangan tampil dengan baju islam formal dalam kiprah politik, mamakai idiom dan simbolitas islam untuk mencapai tujuan politiknya. Dalam persaingan politik, islam tampil dengan wajah politik dan karenanya beralasan jika mereka dikelompokkan dalam kubu Islam politik.

Sementara itu, kaum substansial tampaknya tak terlalu peduli pada idiom dan institusi islam politik formal seperti apa yang diperjuangkan kaum formalis. Ada alasan penting yang melandasi pemikiran ini yaitu; *Pertama*, mereka khawatir bahwa eksploitasi simbolitas islam justeru dapat merusak keluhuran islam, terutama jika actor politiknya tak berhasil tampil dengan etika islam baik disadari atau tidak.

Kedua, sejarah islam di era kenabian menurut penilaian mereka dalam kenyataannya dinilai tidak menampilkan wajah islam secara formal dalam wujud Negara. Konstitusi yang mengatur Negara kala itu tidak secara formal dinamakan konstitusi islam, tapi konstitusi Madinah yang kala itu masyarakat pluralis baik dalam suku maupun agama. Berpijak pada fakata ini mala hal yang penting dalam islam adalah etika, bukan pada formalistas bentuk.

Ketiga, mereka melihat bahwa realitas kehidupan bernegara tidak dihuni oleh masyarakat homogeny termasuk dalam soal agama. Adalah tidak etik untuk memaksakan islam formal berlaku dalam tatanan Negara yang pluralistis karena agama lain sudah pasti akan pula memiliki agenda yang sama. Karena itu, wajah pluralism perlu ditampilkan untuk mewujudkan kerja sama lintasan kelompok agam tanpa melupakan nilai-nilai ideal dalam islam. Islam melalui organisasi inklusif ini justeru akan secara leluasa diinfiltrasikan dalam kehidupan kemasyarakatan secara luas tanpa perlu menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan. Islam dalam konteks ini disublimasikan dalam konteks cultural dengan membumikan dan mengaktualisasikan ajaan islam dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Dengan pendekatan cultural inilah sosialisasi, internalisasi dan enkulturasi ajaran islam dapat mejangkau seluruh masyarakat baik disadari atau tidak tanpa menemui resistensi terutama dari kelompok non-islam. Dapa dipahami jika kelompok ini dinamakan islam cultural. Pandangan tentang *islam yes, partai islam no*, kiranya dapat dijadikan contoh yang tepat dalam pengaplikasian pola pikir tersebut¹³ yang berbeda dengan kelompok pertama yang berpandangan *islam yes, partai islma juga yes*.

¹² Fenomena ini diperkuat oleh pemikiran Abdurrahman Wahid yang berpendapat kendati Indonesia tak menganut Negara Islam bukan berarti umma islam sebagai bagian terbesar bangsa telah meninggalkan apa yang terpenting dalam islam; yakni kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¹³ Nurcholis Madjid, *Islam; Kemordenan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1991), 204 dan 253.

D. PETA FRAGMENTASI PARTAI-PARTAI ISLAM

Para pemikir tentang islam, umumnya berpendapat bahwa islam hakikatnya bukan sebuah agama dalam pengertian umum, yakni hanya menyangkut kehidupan pribadi manusia dalam hubungan dengan tuhan. Islam adalah cara hidup total di mana ajarannya merupakan petunjuk hidup yang menyangkut seluruh sisi kehidupan, pribadi dan masyarakat, material maupun moral, ekonomi, social budaya, hokum dan politik serta masalah local maupun internasional.¹⁴ Inilah ciri khas islam yang oleh mayoritas islamolog disebut tidak dimiliki oleh ajaran agama lain. Dalam konteks ini, setiap pemimpin politik islam memiliki pemikiran yang hampir serupa.

Karena itu, bagi suatu kelompok tertentu bahwa muslim hakikatnya tak hanya dituntut untuk menyerahkan diri kepada Tuhan hanya di tempat ibadah, tapi melainkan di sembarang waktu dan tempat. Ibadah hakikatnya bukan hanya mencakup ritualisme semata, tapi juga penerimaan tuhan sebagai sasaran loyalitas tertinggi, pusat ketundukan. Implementasi dari pemikiran politik islam semacam ini tentu saja untuk mewujudkan tujuan dasar islam yakni masyarakat berkeadaban yang rahmatan lil alamin.

Namun dalam mengimplementasikan pemikiran tadi diantara kaum islamis terdapat variasi bahkan fragmentasi pemikiran baik dalam dimensi ideologis, politis, cultural, sosio ekonomi dan pola gerakan.

Perbedaan visi dan interpretasi inilah yang sering kali dibawa-bawa pula dalam konstelasi kehidupan politik yang kadang memperlihatkan perseteruan. Sebenarnya, fragmentasi visi dan interpretasi di lingkungan islam ini hal yang wajar, sebab dalam islam, pluralitas bukan sja dibolehkan, tapi justru merupakan keniscayaan yang tak terhindarkan.¹⁵

Khusus kasus politik islam pasca orde baru seperti dengan tampilnya PKB memang memperlihatkan fenomena yang berlainan dibandingkan dengan sebelumnya; yakni tidak semua kaum santri beramai-ramai membbikin partai islam dalam wujud formal. Kaum formalis memang meluncurkan partai-partai islam formal. Bahkan PPP yang semula menjadikan pancasila sebagai asas tunggal dan tanda gambar ka'bah digantikan bintang segi lima, maka pada pasca orde baru kembali menampilkan diri sebagai partai berideologi islam dengan kembali memakai lambang ka'bah.¹⁶ Sementara itu, kaum substansialis pluralis dan inklusif kendati basis massanya tetap mengandalkan pada suara islam.

Namun perlu dicatat, kendati kaum substansilais bersikap akomodatif pada politik dengan membuang label formalism, sehingga di era orde baru dapat lebih dekat dengan kekuasaan namun mereka tidak serta merta menerapkan politik konservatisme. Banyak tikoh politik dilingkungan substansialis yang bersikap kritis pada pemerintah. Kritisisme ini oleh William Liddle, dicermati sebagai diletakkan di atas landasan kepentingan baik keislaman mauapun keindonseiaan. Sebagian mereka malah mengkritik pemerintahan di samping secara sungguh-sungguh mengkritik tak kunjung diwujudkannya prinsip keadilan social dalam perekenomian Negara. Sementara itu, dari sisi internal ummat Islam, selama dua dekade terakhir

¹⁴ G.H. Jansen, *Islam Milton*, terj. Armahedi Mahzar (Badung: Pustaka, 1980), 10.

¹⁵ Chozin Chumaidi, *Bangkitlah Partaiku; Ideologi, Strategi dan Kepemimpinan PPP* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2011), 24.

¹⁶ Rancangan Materi Mukhtar VII Partai Persatuan Pembangunan, Bandung, Juli 2011.

abad 20 para intelektual muslim yang berpaham substansial –yang sama sekali tidak monolitik dalam orientasi keagamaan, politik dan social –berusaha menerjemahkan peran mereka secara strategis dan menjalankan hasil terjemahan itu secara tepat agar mereka; *Pertama*, tidak terjebak dengan mengulangi kesalahan masa lampau akibat bacaan dan penilaian keliru tentang hambatan structural dan cultural. *Kedua*, dapat membawa ummat menuju gerbang masa depan yang lebih cerah.

Karena itu, berbeda dengan cara menyimak partai Islam di masa orde baru dan sebelumnya di mana partai islam secara kasat mata dapat disimak apa adanya dari nama maupun ideologinya, maka di era pasca orde baru penggambaran dan analisis partai islam perlu dipijakkan pula pada kerangka substansialisme dan formalisme ini. Atas argumentasi tadi dalam kajian ini penulis memasukkan PKB dalam analisis politik islam. Dengan demikian dari 141 partai yang telah mendapat pengesahan Departemen Kehakiman, ada 41 di antaranya termasuk golongan partai Islam.

Ke-41 partai Islam itu antara lain meliputi; (1) Partai Ahlus Sunnah wal Jama'ah (2) Partai Aliansi Kebangkitan Muslim Sunni Indonesia (3) Partai Abul Yatama (4) Partai Amanat Masyarakat Madani (5) Partai Politik Tharikat Islam (6) Partai Bakti Muslim (7) Partai Bulan Bintang (8) Partai Cinta Damai (9) Partai Demokrasi Islam Republik Indonesia (10) Partai Dinamika Ummat (11) Partai Dua Syahadat (12) Partai Era Reformasi Tarbiyyah Islamiyyah (13) Partai Indonesia Baru (14) Partai Islam Indonesia (15) Partai Islam Persatuan Indonesia (16) Partai Gerakan Insan Muttaqin Indonesia (17) Partai Ka'bah (18) Partai Keadilan (19) Partai Kebangkitan Bangsa (20) Partai Kebangkitan Kaum AhlulSunnah wal Jama'ah (21) Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (22) Partai Kebangkitan Ummat (23) Partai Kesatuan Ummat Indonesia (24) Partai Kesatuan Wahdatul Ummah (25) Partai Politik Islam Masyumi (26) Partai Majawangi (27) Partai Masyumi Baru (28) Partai Nahdatul Ummah (29) Partai Persatuan (30) Partai Persatuan Islam Indonesia (31) Partai Persatuan Pembangunan (32) Partai Persatuan Persatuan Sabilillah (33) Partai Pengamal Tarikat Islam (35) Partai Politik Tarikat Indoensia (36) Partai Solidaritas Uni Indonesia (37) Partai Sarikat Islam Indonesia 1905 (38) Partai Sarikat Islam Indonesia (39) Partai Ummat Islam (40) Partai Ummat Muslim Indonesia (41) Partai Islam Demokrat.

E. PENUTUP

Demikian analisis seputar fragmentasi partai-partai politik Islam pasca orde Baru mengindikasikan adanya interpretasi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Ini tentu saja, akan melahirkan euphoria politik yang inklusif demi tegaknya *izzul Islam wal Muslimin*.

Hanya saja, hemat penulis, dari sejumlah partai yang menjamur di atas, hanya ada satu partai yang menjadi dambaan dan tetap melekat di hati yaitu PPP. Hal ini disebabkan, bukan karena subjektifisme penulis, tetapi fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan bahwa seluruh parati islam yang ada jelas-jelas embrionya berasal dari PPP.

Dari analisis historis, bahwa ketika orde baru masih eksis, partai yang ada hanya terdapat tiga partai yaitu Golkar, PDI dan PPP. Dari ketiga partai tersebut yang berafiliasi dan bernafaskan islam hanya PPP. Namun begitu bola

reformasi digilindingkan, maka PPP dijadikan bola patokan yang melahirkan partai-partai islam lainnya, semisal PKB, PBB, PKS dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkmad Muqawwam, *Membangun Kembali Kejayaan* (Jakarta: Pustaka Informasi, 2011).
- Burhan D. Magenda, *Perubahan dan Kesenambungan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992).
- Dhuroruddin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008).
- Nur Khalis Madjid, “Kata Pengantar” dalam Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1996).
- G.H. Jansen, *Islam Milton*, terj. Armahedi Mahzar (Bandung: Pustaka, 1980).
- Nur Khalis Madjid, “Cita-cita Politik Islam” dalam *Aspirasi Ummat Islam Indonesia* (Jakarta: Leppenas, 1983).
- Ahmad Syafii Maarif, “Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia” dan M. Amien Rais, “Indonesia dan Demokrasi” dalam *Aspirasi Ummat Islam Indonesia* (Jakarta: Lappenas, 1983).
- Nurcholis Madjid, *Islam; Kemordenan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1991).
- G.H. Jansen, *Islam Milton*, terj. Armahedi Mahzar (Bandung: Pustaka, 1980).
- Rancangan Materi Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, Bandung, Juli 2011.
- Chozin Chumaidi, *Bangkitlah Partaiku; Ideologi, Strategi dan Kepemimpinan PPP* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2011).